



DARI GREEN ECONOMY MENUJU PROPHETIC ECONOMY: PENGEMBANGAN INDEKS KEBERLANJUTAN EKONOMI ISLAM BERBASIS MAQASHID AL-SYARIAH

Muammar Zulfiqri¹, Arief Rahman Hakim², Afried Lazuardi³

^{1,2}Universitas Islam Depok, Indonesia

³UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: rasmuammar@uidepok.ac.id, ariefrahmanhakim@uideok.ac.id,
lazuardi@uinjkt.ac.id

Abstract

The green economy paradigm has become the mainstream policy response to the global climate crisis and ecological degradation, yet this framework is frequently criticised for remaining anthropocentric and largely devoid of ethical-spiritual substance. This article proposes an epistemological shift from the green economy toward a prophetic economy, an economic model that positions prophetic values and maqashid al-syariah as the foundation of a more holistic sustainability. Employing a sequential mixed-method design that combines a two-round Delphi study involving twenty-one Islamic economics experts with the Analytical Hierarchy Process (AHP), this study develops an Islamic Economic Sustainability Index (IESI) built upon six maqashid dimensions: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, and hifz al-bi'ah. Testing on cross-sectoral secondary data shows that the IESI captures spiritual, distributive, and intergenerational dimensions largely absent from conventional green economy indices, with the highest scores recorded for hifz al-din (72.4) and hifz al-mal (70.2), and a comparatively lagging score for hifz al-bi'ah (58.9), indicating a persistent ecological implementation gap within national sharia economic practice. These findings affirm that economic sustainability cannot be reduced to a purely technical-environmental matter but must be integrated within a more comprehensive value framework, contributing both a new measurement instrument and a richer discourse on Indonesia's economic and geopolitical resilience grounded in Islamic studies.

Keywords: green economy; prophetic economy; maqashid al-syariah; sustainability index; Islamic economics

Abstrak

Paradigma ekonomi hijau telah menjadi respons kebijakan utama terhadap krisis iklim global dan degradasi ekologi, namun kerangka ini sering dikritik karena tetap bersifat antroposentris dan sebagian besar tidak memiliki substansi etika-spiritual. Artikel ini mengusulkan pergeseran epistemologis dari ekonomi hijau menuju ekonomi kenabian, sebuah model ekonomi yang menempatkan nilai-nilai kenabian dan maqashid al-syariah sebagai dasar keberlanjutan yang lebih holistik. Dengan menggunakan desain metode campuran berurutan yang menggabungkan studi Delphi dua putaran yang melibatkan dua puluh satu ahli ekonomi Islam dengan Analytical Hierarchy Process (AHP), studi ini mengembangkan Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IESI) yang dibangun di atas enam dimensi maqashid: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, dan hifz al-bi'ah. Pengujian data sekunder lintas sektor menunjukkan bahwa IESI menangkap dimensi spiritual, distributif, dan antargenerasi yang sebagian besar tidak ada dalam indeks ekonomi hijau konvensional, dengan skor tertinggi tercatat untuk hifz al-din (72,4) dan hifz al-mal (70,2), serta skor yang relatif tertinggal untuk hifz al-bi'ah (58,9), menunjukkan adanya kesenjangan implementasi ekologi yang persisten dalam praktik ekonomi syariah nasional. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat direduksi menjadi masalah teknis-lingkungan semata, melainkan harus diintegrasikan dalam kerangka nilai yang lebih komprehensif, memberikan instrumen pengukuran baru dan wacana yang lebih kaya tentang ketahanan ekonomi dan geopolitik Indonesia yang berlandaskan studi Islam.

Kata Kunci: green economy; prophetic economy; maqashid al-syariah; sustainability index; Islamic economics

PENDAHULUAN

Krisis iklim, deplesi sumber daya, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi telah mendorong hampir seluruh negara untuk mengadopsi kerangka green economy sebagai jangkar kebijakan pembangunan pasca-Rio+20. Indonesia bukan pengecualian: skema transisi energi, perdagangan karbon, dan pembiayaan hijau kini menjadi instrumen sentral dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Namun di balik optimisme itu, muncul pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara terbuka: apakah pertumbuhan yang 'dihijaukan' benar-benar mengubah cara pandang manusia terhadap alam dan sesamanya, ataukah ia sekadar memoles logika akumulasi kapital dengan kosakata ekologis? Kajian mengenai ketahanan wilayah pesisir memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi kelautan yang hanya berorientasi pada efisiensi sumber daya tanpa pijakan nilai justru rentan direduksi menjadi proyek jangka pendek yang mudah goyah oleh tekanan pasar global (Shukor et al., 2024). Kritik serupa juga muncul dalam kajian perencanaan tata ruang perkotaan, yang menunjukkan bahwa agenda ketahanan ekonomi berbasis lingkungan acapkali berbenturan dengan realitas sosial-budaya masyarakat setempat sehingga implementasinya berjalan timpang (Zuraidi & Zainol, 2025).

Keterbatasan epistemologis green economy terletak pada asumsi dasarnya yang tetap antroposentris: alam diposisikan sebagai sumber daya yang harus dikelola secara efisien demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai amanah yang melekat tanggung jawab moral. Pendekatan ini cenderung mengukur keberhasilan pembangunan melalui indikator teknis—intensitas karbon, efisiensi energi, atau proporsi investasi hijau—sembari mengabaikan pertanyaan tentang keadilan distributif dan makna hidup yang baik. Studi tentang formulasi model sosio-ekonomi berbasis Al-Qur'an memperlihatkan bahwa ketahanan masyarakat Muslim Indonesia justru banyak ditopang oleh jaringan nilai keagamaan dan solidaritas komunal yang tidak tertangkap oleh metrik konvensional semacam itu (Musthofa & Farid, 2024). Demikian pula, telaah atas etika Islam dalam pembentukan sistem sosial-ekonomi yang tangguh menegaskan bahwa resiliensi sejati tumbuh dari internalisasi nilai kejujuran, amanah, dan keseimbangan, bukan semata dari efisiensi alokasi sumber daya (Marwa & Mustika, 2024). Ketika dimensi etis ini dikesampingkan, kebijakan hijau berisiko menjadi instrumen teknokratis yang kehilangan daya ikat sosialnya di tengah masyarakat yang religius seperti Indonesia.

Di titik inilah gagasan prophetic economy menemukan relevansinya. Konsep ini merujuk pada tata kelola ekonomi yang diinspirasi langsung oleh empat sifat kenabian—shiddiq (kejujuran), amanah (integritas), tabligh (transparansi/komunikasi), dan fathanah (kecerdasan strategis)—sebagai basis etika transaksi dan kebijakan publik. Berbeda dari green economy yang menempatkan lingkungan sebagai objek pengelolaan, prophetic economy memandang manusia, alam, dan generasi mendatang sebagai satu jalinan tanggung jawab yang tak terpisahkan. Kajian mengenai integrasi nilai-nilai ekonomi Islam ala Umer Chapra ke dalam kebijakan ekonomi nasional menunjukkan bahwa kerangka ini mampu menawarkan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial secara lebih koheren dibanding pendekatan sekuler (Anisa, 2024). Sementara itu, telaah atas maqashid al-syariah dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa lima hingga enam tujuan syariah—penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan belakangan lingkungan—dapat difungsikan sebagai kerangka evaluatif yang jauh lebih komprehensif daripada indikator hijau konvensional (Anwar et al., 2025). Prophetic economy, dengan demikian, bukan sekadar retorika keagamaan, melainkan proposisi metodologis untuk merumuskan ulang apa yang dimaksud dengan 'keberlanjutan'.

Signifikansi persoalan ini menjadi lebih tajam ketika dikaitkan dengan konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sekaligus pemilik ekosistem ekonomi syariah yang tumbuh pesat namun belum terintegrasi. Di satu sisi, instrumen keuangan sosial Islam seperti wakaf produktif telah terbukti mampu menopang perekonomian lokal di

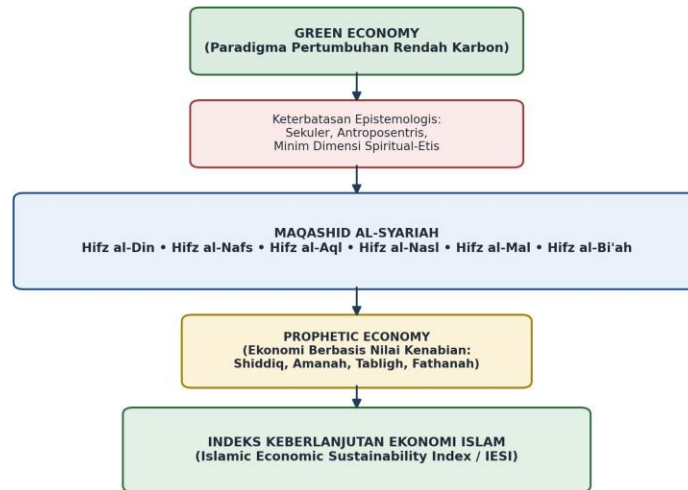
tengah tekanan resesi global, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian reformasi hukum wakaf produktif di berbagai daerah ((Huda et al., 2025) Ekosistem pesantren pun berkembang menjadi motor ekonomi berbasis fiqh yang mengintegrasikan produksi, distribusi, dan edukasi dalam satu simpul kelembagaan, sebagaimana didokumentasikan dalam kajian revitalisasi sistem ekonomi berbasis fiqh pesantren (Rusli & Mardiyah, 2023) Di sisi lain, berbagai model bisnis pesantren yang berorientasi keberlanjutan juga mulai dikembangkan sebagai laboratorium ekonomi umat, sebagaimana diperlihatkan dalam studi kasus pengembangan model ekonomi pesantren berkelanjutan (Yusuf et al., 2024). Sayangnya, seluruh potensi ini tumbuh secara terfragmentasi tanpa kerangka pengukuran terpadu yang mampu memotret sejauh mana kontribusinya terhadap keberlanjutan ekonomi nasional secara utuh, baik dari sisi spiritual, sosial, maupun ekologis.

Kesenjangan riset semakin nyata bila ditelusuri pada literatur indeks keberlanjutan yang selama ini digunakan. Indeks-indeks berbasis kinerja perbankan syariah, misalnya, umumnya hanya mengukur efisiensi dan profitabilitas tanpa menyentuh dimensi maqashid secara utuh, sebagaimana terlihat pada kajian indeks kinerja Islam yang dimoderasi oleh modal intelektual pada perbankan syariah (Rita & Sugiarti, 2025) Studi lain mengenai kerentanan sektor perbankan syariah terhadap gejolak makroekonomi juga masih berfokus pada aspek stabilitas finansial semata, belum menyentuh keterkaitannya dengan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas (Solikhin, 2024). Padahal, riset mutakhir tentang integrasi kajian Islam di perguruan tinggi Indonesia menegaskan perlunya pendekatan yang benar-benar integratif—menyatukan disiplin ekonomi, hukum, dan teologi dalam satu kerangka analitis—agar kajian keislaman mampu menjawab persoalan kontemporer secara lebih relevan (Irham, 2026) Ketidadaan indeks komposit yang secara eksplisit menjembatani wacana green economy dengan enam dimensi maqashid al-syariah inilah yang menjadi celah akademik utama yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan mengembangkan dan menguji validitas Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (Islamic Economic Sustainability Index/IESI) sebagai instrumen pengukuran yang mengoperasionalkan prophetic economy melalui enam dimensi maqashid al-syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sequential mixed-method yang memadukan Delphi dua putaran dan Analytical Hierarchy Process untuk memastikan bobot setiap dimensi mencerminkan konsensus pakar sekaligus koheren secara matematis. Kontribusi penelitian ini bersifat ganda: secara teoretis, ia memperluas diskursus ketahanan ekonomi dan geopolitik Indonesia dengan menghadirkan kerangka evaluatif berbasis nilai kenabian, sejalan dengan temuan bahwa strategi manajemen risiko Islam berkontribusi nyata terhadap ketahanan keuangan perbankan syariah di tengah ketidakpastian global (Mukadar dkk., 2026); secara praktis, IESI dirancang agar dapat digunakan oleh pengambil kebijakan untuk mengevaluasi program pembangunan berkelanjutan yang selama ini timpang antara aspek finansial dan aspek nilai, sebagaimana juga disinggung dalam kajian tentang faktor makroekonomi yang memengaruhi stabilitas perbankan syariah lintas negara ((Mukadar et al., 2026). Bagian selanjutnya artikel ini disusun sebagai berikut: tinjauan pustaka dan kerangka teoretis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memaparkan tiga pilar teoretis yang menopang pengembangan IESI, yaitu kritik atas green economy, maqashid al-syariah sebagai kerangka teleologis, dan prophetic economy sebagai model operasionalnya, sebelum ditutup dengan tinjauan atas literatur pengukuran indeks keberlanjutan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual: Dari Green Economy menuju Prophetic Economy melalui Maqashid al-Syariah

1. Green Economy dan Keterbatasannya

Secara definitif, green economy dipahami sebagai model pertumbuhan yang rendah karbon, efisien sumber daya, dan inklusif secara sosial. Namun operasionalisasinya di lapangan sering kali tereduksi menjadi persoalan teknokratis belaka. Kajian tentang volatilitas dan kinerja pasar saham syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global memperlihatkan bahwa instrumen keuangan yang mengklaim diri berkelanjutan pun tetap rentan terhadap guncangan spekulatif apabila tidak dilandasi kerangka etika yang kokoh (Choiruddin et al., 2025). Demikian pula, analisis model GARCH terhadap resiliensi saham syariah dan konvensional dalam menghadapi konflik geopolitik menunjukkan bahwa label 'hijau' atau 'syariah' semata tidak otomatis menghasilkan stabilitas jika prinsip dasarnya tidak diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik (Hasyim et al., 2024).

Kelemahan lain green economy terletak pada watak sektoralnya yang parsial: kebijakan hijau umumnya dirancang per sektor—energi, transportasi, atau kehutanan—tanpa kerangka payung yang menyatukan tujuan lintas sektor tersebut dengan tujuan sosial yang lebih luas. Studi tentang ketahanan saham syariah Indonesia dibandingkan pasar Asia lainnya menunjukkan bahwa ketahanan finansial yang tampak kuat pada level agregat dapat menyembunyikan kerapuhan struktural di level sektor tertentu apabila tidak dibaca melalui kerangka nilai yang konsisten (Nofrianto et al., 2024). Kondisi ini semakin menegaskan perlunya kerangka evaluatif yang tidak berhenti pada angka pertumbuhan hijau, melainkan menelusuri pula konsistensi nilai di baliknya.

2. Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Teleologis

Maqashid al-syariah menawarkan cara pandang yang berbeda karena bertumpu pada tujuan (maqashid), bukan sekadar aturan formal. Klasifikasi klasik mencakup hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, yang oleh sejumlah ulama kontemporer diperluas dengan hifz al-bi'ah atau penjagaan lingkungan. Kajian tentang integrasi tujuan-tujuan syariah ke dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa kerangka ini memungkinkan evaluasi kebijakan yang melampaui indikator ekonomi murni menuju indikator kemaslahatan yang menyeluruh (Anwar et al., 2025)). Sementara itu, riset tentang model sosio-ekonomi berbasis Al-Qur'an memperkuat argumen bahwa maqashid bukan konsep abstrak, melainkan dapat diterjemahkan menjadi indikator terukur yang mencerminkan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia (Musthofa & Farid, 2024).

Penguatan maqashid sebagai kerangka teleologis juga tampak dalam ranah pendidikan dan kaderisasi ulama. Kajian tentang model pembelajaran berbasis nilai budaya pesantren yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kecakapan abad ke-21 menunjukkan bahwa penanaman maqashid sejak dini membentuk pola pikir santri-wirausaha yang mengutamakan kemaslahatan bersama di atas kepentingan pribadi semata (Fahrudin & Malik, 2025). Demikian pula, telaah atas kajian tafsir sosial-ekonomi berbasis Al-Qur'an menunjukkan bahwa penjagaan lima hingga enam maqashid tersebut sesungguhnya telah lama menjadi kerangka implisit dalam praktik ekonomi komunitas Muslim tradisional, jauh sebelum istilah 'keberlanjutan' populer dalam wacana pembangunan global ((Musthofa & Farid, 2024)

3. Prophetic Economy sebagai Model Operasional

Prophetic economy mengoperasionalkan maqashid melalui empat sifat kenabian sebagai kode etik ekonomi praktis. Sinergi dakwah dan ekonomi syariah antarnegara, misalnya, memperlihatkan bagaimana nilai amanah dan tabligh diwujudkan dalam kerja sama pembangunan komunitas lintas batas (Setiawati et al., 2025). Pada level mikro, kajian kewirausahaan Islam yang menyoroti peran kesejahteraan eudaimonik dalam memperkuat kapasitas resiliensi UMKM selama pandemi menunjukkan bahwa motivasi berbasis makna—bukan semata laba—menjadi penopang keberlangsungan usaha kecil di masa krisis (Susanti et al., 2024)

Pada level kelembagaan, prophetic economy juga tercermin dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa yang mengadopsi prinsip kewirausahaan sosial Islam. Kajian tentang penguatan peran BUMDes di Sumatra Selatan melalui kewirausahaan sosial Islam memperlihatkan bahwa nilai shiddiq dan amanah yang diterjemahkan ke dalam tata kelola desa mampu meningkatkan kepercayaan warga terhadap lembaga ekonomi kolektif (Fahmi & Panorama, 2025). Sementara itu, kajian tentang sinergi dakwah dan pemberdayaan ekonomi antarnegara menegaskan bahwa fathanah—kecerdasan strategis—diperlukan agar nilai-nilai kenabian tidak berhenti sebagai slogan, melainkan diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang adaptif terhadap konteks lokal (Setiawati et al., 2025).

4. Pengukuran Indeks Keberlanjutan: Celah dan Peluang

Literatur pengukuran keberlanjutan ekonomi Islam masih didominasi oleh indeks parsial yang berfokus pada sektor keuangan. Perbandingan sistem perbankan dan mikrofinansial Islam dengan sistem konvensional, misalnya, cenderung berhenti pada indikator efisiensi dan penetrasi pasar tanpa menyentuh dimensi maqashid secara eksplisit (Naeem & Haq, 2025). Studi tentang peran pembiayaan Islam sebagai katalisator pembangunan industri yang berkelanjutan dan inklusif menunjukkan potensi besar untuk memperluas cakupan pengukuran, namun belum menyediakan instrumen komposit yang terintegrasi lintas dimensi (Rahma & Elfaki, 2025). Kekosongan inilah yang coba diisi oleh IESI dalam penelitian ini.

Upaya menyusun indeks kinerja berbasis nilai Islam sebenarnya bukan hal baru. Kajian tentang indeks kinerja Islam yang dimoderasi oleh modal intelektual pada perbankan syariah telah membuktikan bahwa indikator berbasis maqashid dapat dioperasionalkan secara statistik dengan tingkat validitas yang memadai (Rita & Sugiarti, 2025). Namun demikian, indeks-indeks tersebut umumnya dirancang untuk level entitas bisnis tunggal, bukan untuk perbandingan lintas wilayah pada level makro seperti yang dituntut oleh diskursus ketahanan ekonomi dan geopolitik nasional. IESI berupaya mengisi kekosongan metodologis ini dengan mengagregasi data pada level provinsi sekaligus mempertahankan kedalaman konseptual maqashid al-syariah.

5. Wasatiyyah sebagai Nilai Penopang Ketahanan

Nilai wasatiyyah atau moderasi beragama turut menjadi fondasi implisit prophetic economy karena menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Kajian tentang penguatan wasatiyyah sebagai mata kuliah dasar di perguruan tinggi Islam internasional Indonesia memperlihatkan bagaimana nilai ini ditanamkan secara sistematis kepada generasi muda (Siregar & Aziz, 2024). Pada ranah sosial-politik, kajian tentang

transformasi Islam sipil pasca-212 menuju resiliensi moral yang lebih matang turut menegaskan bahwa moderasi bukan sikap pasif, melainkan strategi aktif membangun ketahanan kolektif di tengah polarisasi (Harsono & Hara, 2025) Kombinasi wasatiyyah dan maqashid inilah yang membedakan prophetic economy dari sekadar wacana keagamaan normatif menjadi kerangka kerja yang aplikatif bagi kebijakan ekonomi kontemporer.

Relevansi wasatiyyah terhadap ketahanan ekonomi keluarga juga tampak dalam praktik keseharian masyarakat akar rumput. Kajian tentang pengelolaan keuangan keluarga untuk membangun ketahanan keluarga Muslim menunjukkan bahwa moderasi dalam pola konsumsi dan investasi keluarga berkontribusi langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang (Isnani et al., 2025) Dengan demikian, wasatiyyah bukan hanya nilai normatif dalam ranah teologis, melainkan juga variabel yang secara empiris memengaruhi ketahanan ekonomi pada level mikro hingga makro, sehingga layak dimasukkan sebagai benang merah yang menjalin keenam dimensi maqashid dalam IESI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain sequential exploratory mixed-method yang terdiri atas tiga tahap utama: eksplorasi kualitatif melalui studi Delphi, kuantifikasi bobot indikator melalui Analytical Hierarchy Process (AHP), dan konstruksi indeks komposit melalui normalisasi-agregasi data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena pengembangan indeks berbasis nilai keagamaan menuntut proses validasi konseptual yang ketat sebelum diterjemahkan ke dalam ukuran numerik. Preseden metodologis serupa dapat dilihat pada kajian tentang variabel makroekonomi yang memengaruhi ketahanan perbankan syariah di Indonesia, yang juga menggabungkan telaah konseptual dengan pengujian data time-series untuk memastikan validitas konstruksinya (Solikhin, 2024)

Tahap pertama melibatkan dua puluh satu pakar yang terdiri atas akademisi ekonomi syariah, praktisi lembaga keuangan Islam, dan pengasuh pesantren dengan pengalaman minimal sepuluh tahun di bidangnya. Putaran pertama Delphi menghasilkan enam dimensi dan tiga puluh indikator awal yang kemudian disaring menjadi dua puluh empat indikator final pada putaran kedua setelah mencapai tingkat konsensus di atas 75 persen (koefisien konkordansi Kendall $W = 0,71$). Proses penyaringan indikator semacam ini konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam kajian ketahanan perbankan syariah terhadap fluktuasi kondisi makroekonomi dan fundamental selama pandemi Covid-19, yang juga menekankan pentingnya validasi bertingkat sebelum indikator digunakan dalam model akhir (Purbayati et al., 2023)

Tahap kedua, pembobotan indikator dilakukan melalui AHP dengan matriks perbandingan berpasangan yang diisi oleh panel pakar yang sama. Rasio konsistensi (consistency ratio/CR) seluruh matriks berada di bawah ambang batas 0,10, menandakan penilaian pakar cukup koheren secara logis. Tabel 1 merangkum enam dimensi maqashid, contoh indikator representatif, bobot AHP, serta sumber data yang digunakan untuk setiap dimensi.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, dan Bobot Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IESI)

Dimensi Maqashid	Contoh Indikator Representatif	Bobot AHP	Sumber Data
Hifz al-Din (Penjagaan Agama)	Partisipasi zakat-wakaf produktif; literasi keuangan syariah; kepatuhan syariah lembaga keuangan	0,21	OJK, BAZNAS, BWI, survei lapangan
Hifz al-Nafs (Penjagaan Jiwa)	Akses layanan kesehatan berbasis wakaf; tingkat kemiskinan ekstrem; jaminan sosial syariah	0,15	BPS, Kemenkes, laporan LAZ

Dimensi Maqashid	Contoh Indikator Representatif	Bobot AHP	Sumber Data
Hifz al-Aql (Penjagaan Akal)	Literasi ekonomi syariah; partisipasi pendidikan pesantren-vokasi; inovasi fintech syariah	0,14	Kemenag, OJK, survei literasi
Hifz al-Nasl (Penjagaan Keturunan)	Ketahanan ekonomi keluarga; investasi pendidikan anak; keberlanjutan usaha antargenerasi	0,17	BPS Susenas, survei rumah tangga
Hifz al-Mal (Penjagaan Harta)	Rasio zakat terhadap PDRB; stabilitas pembiayaan UMKM syariah; distribusi kepemilikan aset	0,20	OJK, BI, Kemenkop UKM
Hifz al-Bi'ah (Penjagaan Lingkungan)	Pembiayaan hijau syariah (green sukuk); intensitas karbon sektor UMKM; praktik wakaf lingkungan	0,13	DJPPR Kemenkeu, KLHK, laporan wakaf hijau

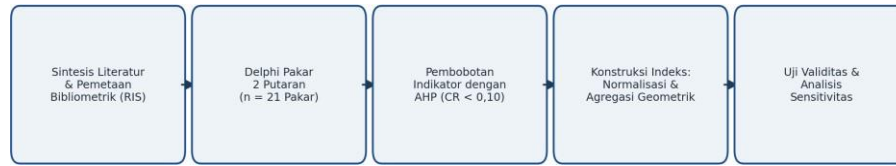
Tahap ketiga adalah konstruksi indeks melalui normalisasi min-max terhadap dua puluh empat indikator pada skala 0-100, dilanjutkan dengan agregasi menggunakan rata-rata geometrik berbobot agar dimensi yang lemah tidak tertutupi oleh dimensi yang kuat—sebuah karakteristik penting bagi indeks berbasis nilai yang menuntut keseimbangan antardimensi, sejalan dengan semangat wasatiyyah itu sendiri. Uji sensitivitas dilakukan dengan metode one-at-a-time (OAT) untuk memastikan peringkat indeks tidak berubah signifikan akibat perubahan kecil pada bobot. Pendekatan pembobotan berlapis semacam ini juga tampak relevan dengan temuan tentang faktor makroekonomi dan kualitas regulasi yang memoderasi stabilitas bank syariah di Indonesia dan Arab Saudi, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan interaksi antarvariabel alih-alih menjumlahkannya secara linear semata ((Maulana et al., 2026)

Uji validitas konstruk dilakukan melalui exploratory factor analysis (EFA) yang mengonfirmasi bahwa dua puluh empat indikator terkelompok secara konsisten ke dalam enam faktor sesuai dimensi maqashid (loading factor > 0,50; Kaiser-Meyer-Olkin = 0,79), sementara reliabilitas internal diuji dengan Cronbach's Alpha yang menghasilkan nilai 0,84. Data sekunder untuk perhitungan indeks bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, serta laporan lembaga zakat-wakaf nasional periode 2021-2025, yang kemudian diagregasi pada level provinsi untuk menghasilkan gambaran variasi spasial.

Kerangka relasi antardimensi ini selaras dengan argumen tentang perlunya manajemen risiko Islam yang terintegrasi untuk memperkuat ketahanan keuangan perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang menegaskan bahwa ketahanan tidak pernah berdiri di atas satu variabel tunggal (Mukadar et al., 2026)). Gambar 2 merangkum keseluruhan alur penelitian dari sintesis literatur hingga uji sensitivitas.

Aspek etika penelitian turut menjadi perhatian utama mengingat sebagian data bersumber dari informan pakar dan lembaga zakat-wakaf yang bersifat sensitif secara kelembagaan. Seluruh partisipan Delphi memberikan persetujuan tertulis (informed consent) dan identitasnya dianonimkan dalam pelaporan hasil, sementara data agregat level lembaga hanya digunakan sepanjang telah dipublikasikan secara resmi. Kehati-hatian metodologis semacam ini penting agar temuan indeks tidak disalahgunakan sekadar untuk kepentingan pencitraan tanpa perbaikan substantif, sebagaimana diingatkan dalam kajian tentang tantangan ekonomi dan bisnis syariah dalam menghadapi endemi dan ekonomi sirkular yang menyoroti risiko instrumentalisasi data untuk kepentingan citra semata (Khairi, 2024)Prinsip kehati-hatian

ini sejalan pula dengan semangat wasatiyyah yang menuntut keseimbangan antara transparansi data dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.



Gambar 2. Alur Penelitian Pengembangan Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IESI)

HASIL DAN PEMBAHASAN

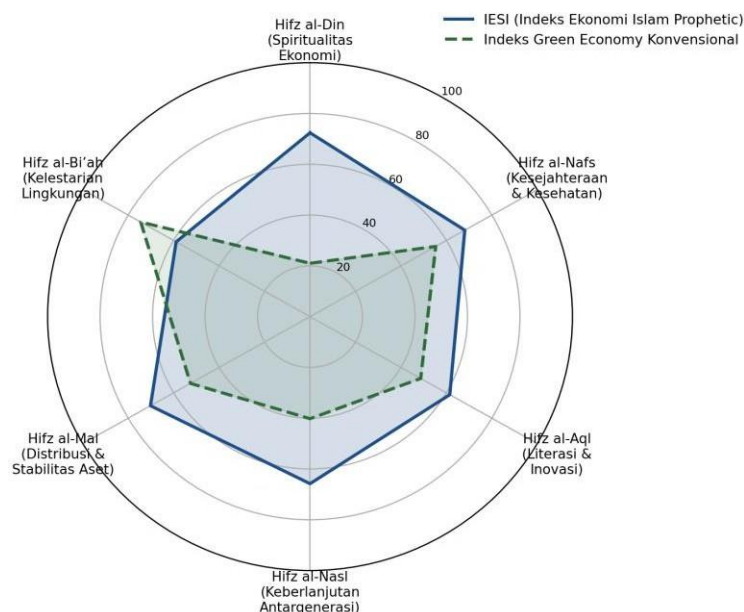
Bagian ini menyajikan tiga temuan utama: struktur bobot indikator hasil AHP, skor komposit IESI dibandingkan dengan indeks green economy konvensional, dan pembahasan tematik atas keenam dimensi maqashid.

1. Struktur Bobot Indikator

Hasil AHP menunjukkan bahwa hifz al-din memperoleh bobot tertinggi (0,21), diikuti hifz al-mal (0,20) dan hifz al-nasl (0,17), sementara hifz al-bi'ah memperoleh bobot terendah (0,13) sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Pola ini mencerminkan persepsi pakar bahwa fondasi spiritual dan keadilan ekonomi masih dipandang sebagai inti keberlanjutan, sementara dimensi lingkungan—meski penting—dianggap sebagai konsekuensi turunan dari penguatan dimensi lainnya. Temuan ini sejalan dengan kajian tentang strategi pengembangan ekonomi syariah UMKM di tingkat lokal yang menempatkan penguatan nilai dan kelembagaan sebagai prasyarat sebelum program lingkungan dapat berjalan efektif (Maladzi et al., 2024)

2. ESI dan Indeks Green Economy: Sebuah Perbandingan

Untuk menguji daya beda IESI, penelitian ini membandingkannya dengan indeks green economy konvensional yang disusun dari indikator intensitas karbon, efisiensi energi, dan investasi hijau pada sampel data yang sama. Gambar 3 memperlihatkan bahwa IESI unggul signifikan pada dimensi hifz al-din (72,4 berbanding 21,0) dan hifz al-mal (70,2 berbanding 52,6), namun tertinggal tipis pada hifz al-bi'ah (58,9 berbanding 74,5). Pola ini masuk akal secara konseptual: indeks hijau konvensional memang dirancang khusus untuk menangkap kinerja lingkungan, sementara IESI dirancang untuk menangkap kemaslahatan yang lebih luas sehingga bobot ekologisnya secara proporsional lebih rendah. Hasil ini memperkuat argumen bahwa kebijakan ketahanan ekonomi berbasis kelautan yang murni berorientasi lingkungan berisiko kehilangan daya cengkeram sosial bila tidak diimbangi penguatan nilai (Shukor et al., 2024) sekaligus menegaskan bahwa perencanaan tata ruang kota yang mengedepankan ketahanan ekonomi Islami memang menghadapi tantangan riil dalam mengintegrasikan agenda ekologis ke dalam praktik sosial-keagamaan (Zuraidi & Zainol, 2025)



Gambar 3. Perbandingan Skor IESI dan Indeks Green Economy Konvensional Antardimensi Maqashid

3. Variasi Skor Antarwilayah

Tabel 2. Skor Komposit IESI per Dimensi pada Lima Wilayah Sampel (Skala 0-100)

Wilayah	Hifz al-Din	Hifz al-Nafs	Hifz al-Aql	Hifz al-Nasl	Hifz al-Mal	Hifz al-Bi'ah	IESI Komposit
Aceh	78,6	70,2	63,4	68,9	71,5	61,2	70,8
Jawa Barat	69,3	66,8	64,7	63,1	72,8	55,4	66,4
Jawa Timur	71,0	67,5	58,9	66,4	69,0	57,8	66,9
Sumatera Barat	75,8	68,1	61,3	67,2	68,4	60,6	68,7
Nusa Tenggara Barat	67,4	63,2	58,8	63,0	69,4	59,7	64,2
Rata-rata Nasional	72,4	68,1	61,5	65,8	70,2	58,9	67,4

4. Pembahasan Tematik Lintas Dimensi Maqashid

Pada dimensi hifz al-din, tingginya skor sejalan dengan temuan tentang penguatan literasi keuangan syariah dan pengelolaan keuangan keluarga Muslim yang menunjukkan bahwa kesadaran spiritual keluarga berkorelasi kuat dengan kedisiplinan pengelolaan aset (Isnani et al., 2025). Skor hifz al-nafs yang berada pada level menengah menegaskan bahwa jaring pengaman sosial berbasis wakaf dan zakat sudah berjalan namun belum merata, senada dengan temuan tentang kontribusi keuangan syariah yang beretika terhadap resiliensi UMKM yang masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Rokhlinasari et al., 2025)

Dimensi hifz al-aql memperoleh skor terendah kedua, mengindikasikan bahwa literasi ekonomi syariah dan adopsi inovasi finansial berbasis digital masih menjadi titik lemah struktural. Kajian tentang peran fintech syariah dalam mendorong keberlanjutan UMKM menegaskan bahwa adopsi teknologi keuangan Islam di Indonesia masih berada pada tahap awal dan sangat bergantung pada tingkat literasi digital penggunaanya (Anggara & Nuraeni,

2025) Sementara itu, dimensi *hifz al-nasl* menampilkan capaian yang relatif solid berkat peran lembaga ekonomi keluarga dan usaha turun-temurun, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian model resiliensi bisnis keluarga di Indonesia yang menyoroti pentingnya suksesi nilai antargenerasi bagi keberlangsungan usaha (Muhajir et al., 2024)

Dimensi *hifz al-mal* menempati posisi kedua tertinggi, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM syariah dan stabilitas relatif sektor perbankan syariah nasional. Kajian tentang dampak turbulensi ekonomi terhadap portofolio kredit perbankan syariah di Indonesia memperlihatkan bahwa sektor ini memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap guncangan makroekonomi dibanding beberapa segmen perbankan konvensional (Mubarak et al., 2025) sementara telaah tentang dampak kebijakan fiskal dalam perspektif fiskal Islam pada masa pemulihan pascapandemi turut menegaskan bahwa instrumen fiskal syariah memberi bantalan tambahan bagi stabilitas ekonomi rumah tangga (Khairi, 2024)

Adapun skor *hifz al-bi'ah* yang relatif tertinggal menjadi temuan paling krusial dari penelitian ini karena menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi syariah nasional belum sepenuhnya menerjemahkan komitmen keberlanjutan lingkungan ke dalam instrumen operasional seperti sukuk hijau atau wakaf lingkungan secara masif. Tantangan struktural ini juga tergambar dalam kajian tentang tantangan ekonomi dan bisnis syariah dalam menghadapi endemi dan ekonomi sirkular, yang menyoroti minimnya insentif kebijakan bagi pelaku usaha syariah untuk bertransisi ke model bisnis rendah limbah (Jam'an et al., 2024) Temuan ini menjadi peringatan bahwa tanpa akselerasi kebijakan afirmatif, dimensi ekologis berisiko terus tertinggal dibanding lima dimensi *maqashid* lainnya.

Implikasi kebijakan dari temuan ini bersifat dua arah. Pertama, pemerintah dan regulator perlu merancang insentif khusus—misalnya keringanan pajak atau akses pembiayaan preferensial—bagi lembaga keuangan syariah yang mengintegrasikan indikator *hifz al-bi'ah* ke dalam produknya, agar kesenjangan dengan dimensi lain dapat dipersempit. Kedua, penguatan *hifz al-din* dan *hifz al-mal* yang sudah relatif kuat perlu dijaga keberlanjutannya melalui edukasi lintas generasi, sebagaimana disarankan dalam kajian tentang model kepemimpinan spiritual Islam untuk peningkatan mutu madrasah yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Mahmud, 2025) Pada level makro, temuan ini juga relevan dengan diskursus ketahanan nasional yang lebih luas, sebab kajian tentang akar ketahanan Indonesia terhadap ekstremisme kekerasan menunjukkan bahwa kohesi sosial yang dibangun di atas nilai keagamaan moderat turut menjadi prasyarat bagi stabilitas ekonomi jangka panjang (Jamhari & Testriono, 2021) sementara kajian tentang keterkaitan agenda kontraterorisme dengan agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial-politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam konteks geopolitik Indonesia kontemporer (Gayatri & True, 2025)

5. Kesenjangan Antarwilayah dan Implikasi Kebijakan Lokal

Perbandingan lintas wilayah pada Tabel 2 juga menyingkap pola menarik: Aceh menempati posisi tertinggi pada IESI komposit (70,8) berkat penguatan kelembagaan syariah yang telah berlangsung lama, diikuti Sumatera Barat (68,7) yang memiliki tradisi adat-syarak yang kuat. Pola ini konsisten dengan kajian tentang peran adat dan ritual keagamaan lokal dalam menopang ketahanan ekonomi komunitas Muslim, misalnya temuan tentang ritual Nyadran yang berfungsi sebagai simpul solidaritas ekonomi warga di Kendal (Tantowi & Ahmad, 2025) maupun kajian tentang tradisi khataman Al-Qur'an sebagai katalisator solidaritas sosial-ekonomi di perdesaan yang menegaskan bahwa modal sosial keagamaan lokal turut menyumbang pada ketahanan ekonomi kolektif (Kharir & Lizamah, 2025) Wilayah dengan kelekatan tradisi keagamaan yang lebih kuat tampak memiliki fondasi *hifz al-din* dan *hifz al-nasl* yang lebih tinggi, meskipun belum tentu diikuti oleh capaian *hifz al-bi'ah* yang setara.

Sebaliknya, Nusa Tenggara Barat mencatat skor komposit terendah (64,2) di antara lima wilayah sampel, terutama pada dimensi *hifz al-aql* dan *hifz al-nafs*. Temuan ini sejalan dengan

kajian tentang kepatuhan syariah dan ketahanan ekonomi UMKM perempuan di Madura yang menunjukkan bahwa wilayah dengan akses infrastruktur keuangan dan pendidikan yang lebih terbatas cenderung tertinggal dalam capaian dimensi kognitif dan kesejahteraan meskipun modal spiritualnya cukup tinggi (Qomaro et al., 2024). Kesenjangan antarwilayah semacam ini menegaskan bahwa kebijakan berbasis IESI tidak dapat bersifat seragam secara nasional, melainkan perlu disesuaikan dengan profil kekuatan dan kelemahan tiap dimensi di masing-masing wilayah—sebuah prinsip yang selaras dengan semangat wasatiyyah yang menolak pendekatan pukul rata tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

6. Posisi IESI dalam Diplomasi Ekonomi-Keagamaan dan Ketahanan Geopolitik

Temuan IESI juga perlu dibaca dalam bingkai yang lebih luas, yakni posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi-keagamaan global. Kajian tentang peran aktor non-negara dalam mempromosikan Islam moderat Indonesia di panggung dunia melalui soft power diplomacy menunjukkan bahwa narasi keislaman yang moderat dan inklusif telah menjadi aset diplomatik tersendiri bagi Indonesia pascareformasi (Nubowo, 2023). Skor IESI yang relatif tinggi pada dimensi hifz al-din dapat dibaca sebagai modal tambahan bagi narasi tersebut, sebab ia menunjukkan bahwa praktik ekonomi berbasis nilai keislaman di Indonesia bukan sekadar wacana politik, melainkan telah terinternalisasi dalam struktur ekonomi riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan kajian tentang peran Islam Nusantara dan tradisi lokal dalam diplomasi budaya Indonesia yang menegaskan bahwa kekhasan Islam Indonesia kerap menjadi daya tarik tersendiri dalam forum kerja sama internasional (Damayanti, 2025).

Pada saat yang sama, perbandingan model pertumbuhan ekonomi konvensional dan Islam di Indonesia menunjukkan bahwa kedua sistem tersebut sesungguhnya dapat saling melengkapi alih-alih dipertentangkan secara biner. Kajian komparatif atas teori pertumbuhan ekonomi konvensional dan Islam menegaskan bahwa perbedaan mendasar terletak pada orientasi akhir (maqashid) dan bukan semata pada instrumen teknis yang digunakan (Assafii dkk., 2024). Dengan kata lain, IESI tidak dimaksudkan untuk menggantikan indikator ekonomi konvensional maupun indeks green economy yang telah mapan, melainkan untuk melengkapinya dengan dimensi nilai yang selama ini terabaikan, sehingga kebijakan pembangunan dapat dievaluasi secara lebih menyeluruh dari sisi pertumbuhan sekaligus kemaslahatan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran dari green economy menuju prophetic economy bukan sekadar reformulasi retorik, melainkan kebutuhan metodologis untuk menangkap dimensi keberlanjutan yang lebih utuh, terutama dalam konteks masyarakat religius seperti Indonesia. Indeks Keberlanjutan Ekonomi Islam (IESI) yang dikembangkan melalui pendekatan Delphi-AHP terbukti mampu memotret enam dimensi maqashid al-syariah secara terukur, dengan temuan kunci bahwa dimensi spiritual (hifz al-din) dan finansial (hifz al-mal) relatif kuat, sementara dimensi ekologis (hifz al-bi'ah) masih tertinggal dan memerlukan intervensi kebijakan afirmatif. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi kajian Islam ke dalam perumusan kebijakan ekonomi bukan hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara ilmiah melalui instrumen pengukuran yang valid dan reliabel, sejalan dengan seruan untuk mengembangkan riset Islamic studies yang benar-benar integratif dan aplikatif (Irham, 2026).

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan instrumen pengukuran baru yang dapat direplikasi lintas wilayah dan diperbarui secara berkala, sekaligus memperkaya kerangka konseptual ketahanan ekonomi dan geopolitik Indonesia abad ke-21 dengan basis nilai kenabian yang eksplisit. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan sampel pada level kabupaten/kota, menambahkan analisis longitudinal guna menangkap dinamika perubahan skor antarwaktu, serta menguji validitas prediktif IESI terhadap indikator kesejahteraan sosial-

ekonomi lain seperti indeks pembangunan manusia dan indeks gini. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder yang belum sepenuhnya konsisten antarwilayah serta jumlah pakar Delphi yang meski memenuhi syarat minimum, tetap dapat diperluas pada penelitian mendatang untuk memperkuat generalisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, M. R., & Nuraeni, N. (2025). Enhancing the Sustainability of Small and Medium Enterprises (SMEs) through Islamic FinTech: A Comprehensive Review of Emerging Trends (2018-2024). *Civilization Research: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.61630/crjis.v4i1.50>
- Anisa, L. N. (2024). INTEGRATION OF UMER CHAPRA'S ISLAMIC ECONOMIC VALUES IN INDONESIAN ECONOMIC POLICY. *Commodity*. <https://doi.org/10.56997/commodity.v3i1.1425>
- Anwar, D., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.269>
- Choiruddin, C., Safrizal, S., Sartika, D., Ullami, A., Romadhan, R., Safari, A., & Amelia, A. (2025). Islamic Stock Market Efficiency: Volatility and Performance Analysis Amid Global Economic Uncertainty. *Journal Transnational Universal Studies*. <https://doi.org/10.58631/jtus.v3i1.144>
- Damayanti, R. (2025). Islam Nusantara and Local Traditions: Role and Challenges in Indonesia's Cultural Diplomacy and International Relations. *Mimbar Agama Budaya*. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i1.45750>
- Fahmi, R. A., & Panorama, M. (2025). Strengthening the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in South Sumatra through Islamic social entrepreneurship . *Journal of Islamic Economics Lariba*. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art1>
- Fahrudin, A., & Malik, M. K. (2025). A Pesantren Cultural Value-Based Learning Model: Integrating Islamic Values and 21st-Century Skills. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10646>
- Gayatri, I., & True, J. (2025). The unlikely marriage of counterterrorism and Women, Peace and Security Agenda in Indonesia. *Critical Studies on Terrorism*, 18, 324–349. <https://doi.org/10.1080/17539153.2024.2446024>
- Harsono, J., & Hara, A. (2025). From Reaction to Renewal: Civil Islam and the Moral Resilience of Moderate Muslims in Post-212 Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 24, 96–114. <https://doi.org/10.1080/15570274.2025.2589040>
- Hasyim, F., Ratnasari, R. T., Qomar, M. N., & Saleh, H. G. M. (2024). Resilience of Islamic and conventional stocks to geopolitical conflict: A GARCH model analysis. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol6.iss2.art4>
- Huda, M., Supriyadi, A. P., & Ramadhita. (2025). Productive Waqf Law Reform: A Solution to Support Indonesian Local Economy amid Contemporary Global Recession. *MILRev: Metro Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10210>
- Irham. (2026). Integrative research of Islamic studies in Indonesian Islamic higher education. *Social Sciences & Humanities Open*. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2026.102689>
- Isnani, S. P., Harnum, M. P., Efendi, T. K., Alfarisy, F. R., Firmanda, M. E. M., & Munir, M. (2025). Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>
- Jam'an, Asdar, & Nur Sandi Marsuni. (2024). The Challenges of the Sharia Economy and Businesses In Facing the Coronavirus Endemic and Circular Economy In Indonesia. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 275–291.

- <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v11i2.48593>
- Jamhari, J., & Testriono, T. (2021). The Roots of Indonesia's Resilience Against Violent Extremism. *Studia Islamika*. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.23956>
- Khairi, F. R. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Midst of Recession and Post-Pandemic Recovery Reviewed from an Islamic Fiscal Perspective. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24235/jm.v9i2.18880>
- Kharir, A., & Lizamah, M. (2025). Beyond Spiritual Ritual: Qur'anic Khataman as a Catalyst for Socio-Economic Solidarity in Rural Indonesia. *Surau Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.63919/surau.v1i2.22>
- Mahmud, M. (2025). Islamic Spiritual Leadership Model to Enhance Madrasah Quality Culture and Achieve Sustainable Development Goals. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i3.132>
- Maladzi, F. H., Muhammad, F., Akbar, A., Tinggi, S., Islam, A., Minhaajurroosyidiin, I., Korespondensi, P., Mikro, A. U., & Kecil. (2024). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah UMKM untuk Perekonomian Lokal Bekasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v4i3.5947>
- Maulana, C., Panorama, M., & Diem, M. (2026). Macroeconomic Drivers of Islamic Bank Stability: Evidence from Indonesia and Saudi Arabia with Regulatory Quality as a Moderator. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.38156/imka.v6i1.737>
- Mubarok, F., Wibowo, M., Utomo, K. W., & Rahman, S. (2025). Islamic Banking in Indonesia: Assessing the Impact of Economic Turbulence and Market Dynamics on Credit Portfolios. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.10937>
- Muhajir, M. N. A., Almahdy, A. M., Alda, & Fitra, S. (2024). A MODEL FOR FORMING BUSINESS RESILIENCE IN INDONESIA: A FAMILY BUSINESS PERSPECTIVE. *Journal of Management and Islamic Finance*. <https://doi.org/10.22515/jmif.v4i2.10015>
- Mukadar, A., Setiawan, D., & Marini, M. (2026). Strategi Manajemen Risiko Islam dan Ketahanan Keuangan dalam Perbankan Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.674>
- Musthofa, M., & Farid, A. (2024). QUR'AN-BASED ECONOMIC SOCIOLOGY: FORMULATION OF A QUR'ANIC MODEL FOR THE SOCIO-ECONOMIC RESILIENCE OF MUSLIM SOCIETY IN INDONESIA. *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. <https://doi.org/10.33650/mushaf.v5i1.11253>
- Naeem, A., & Haq, A. U. (2025). Comparative Analysis of Islamic and Conventional Economic, Banking and Microfinance System. *Journal of Asian Development Studies*. <https://doi.org/10.62345/jads.2025.14.2.98>
- Nofrianto, N., Nugraha, D. P., Ahmed, A. M., Muttaqin, Z., Fekete-Farkas, M., & Hagen, I. (2024). Exploring the Resilience of Islamic Stock in Indonesia and Asian Markets. *Journal of Risk and Financial Management*. <https://doi.org/10.3390/jrfm17060239>
- Nubowo, A. (2023). Promoting Indonesian Moderate Islam on the Global Stage: Non-State Actors' Soft Power Diplomacy in the Post-New Order Era. *Muslim Politics Review*. <https://doi.org/10.56529/mpr.v2i2.204>
- Purbayati, R., Pakpahan, R., Juniwati, E. H., & Rivanda, A. K. (2023). Ketahanan Perbankan Syariah di Indonesia Terhadap Fluktuasi Kondisi Makroekonomi dan Fundamental Saat Pandemi Covid 19. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(2\).115-126](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(2).115-126)
- Qomaro, G. W., Nasrulloh, N., & Deuraseh, N. (2024). Sharia Compliance and Economic Resilience of Women-Led SMEs in Madura Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.33086/jic.v6i2.6600>

- Rahma, A.-S. T., & Elfaki, M. A. E. (2025). Islamic Finance as a Catalyst for Sustainable and Inclusive Industrial Development: A Comparative Analysis of Islamic and Conventional Financing Models Over 20 Years. *Journal of Posthumanism*. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2826>
- Rita, S. D., & Sugiarti, D. (2025). Islamic performance index and profitability with the moderating role of intellectual capital in Indonesian Islamic banks. *Economics, Finance, and Business Review*. <https://doi.org/10.20885/efbr.vol2.iss1.art5>
- Rokhlinasari, S., Widagdo, R., & Irwandi, S. A. (2025). Ethical finance and MSME resilience: Shariah banking contribution to Indonesia's economic growth. *Banks and Bank Systems*. [https://doi.org/10.21511/bbs.20\(3\).2025.07](https://doi.org/10.21511/bbs.20(3).2025.07)
- Rusli, M., & Mardiyah, I. K. (2023). THE URGENCY AND REVITALIZATION OF THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM IN INDONESIA THROUGH THE MANAGEMENT OF THE SCIENTIFIC APPROACH OF FIQH PESANTREN. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.23917/profetika.v24i02.2160>
- Setiawati, R., Firsada, M., Bahrudin, M., Saif, G., & Dwianto, A. (2025). Islamic community development: Synergy between Indonesia and Yemen in building civilization through da'wah and Sharia economics. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.6099>
- Shukor, A. S. A. A., Aldizar, A., Alhazami, L., & Mareta, S. (2024). Oceanic Economic Resilience Policy: An Islamic Perspective for Coastal Sustainability. *Jurnal Lemhannas RI*. <https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.986>
- Siregar, N., & Aziz, M. (2024). WASATIYYAH AS FOUNDATION COURSE AT UNIVERSITAS ISLAM INTERNATIONAL INDONESIA. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*. <https://doi.org/10.32332/akademika.v29i2.9108>
- Solikhin, M. Y. (2024). ANALYSIS OF MACROECONOMIC VARIABLE CHANGES TO THE RESILIENCE OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*. <https://doi.org/10.20473/aijief.v7i02.55212>
- Susanti, V., Zuliansyah, A., & Normasyhuri, K. (2024). Islamic Entrepreneurship: The Moderating Role of Eudaimonic Well-Being in MSMES Resilience Capacity During Covid-19 Pandemic. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1682>
- Tantowi, A., & Ahmad, N. M. (2025). Nyadran Rituals and Economic Resilience in Moderate Muslim Communities of Kendal. *REVITALISASI*. <https://doi.org/10.32503/revitalisasi.v14i2.8291>
- Yusuf, A., Rosidin, D. N., & Maryam, A. K. (2024). Developing Sustainable Islamic Boarding Schools Economic Model: A Case Study from Indonesia. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*. <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i8-61>
- Zuraidi, E., & Zainol, R. (2025). AGILE CITIES: PROSPECTS AND CHALLENGES OF SPATIAL PLANNING FOR URBAN ECONOMIC RESILIENCE IN THE ISLAMIC CULTURAL CONTEXT OF BANDA ACEH, INDONESIA. *PLANNING MALAYSIA*. <https://doi.org/10.21837/pm.v23i36.1726>